Penguatan Demokrasi

Oleh

Satria Novian

Copyright © 2023

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii

PENDAHULUAN 1

PEMBAHASAN 2

DAFTAR PUSTAKA 123

TENTANG PENULIS 124

KATA PENGANTAR

Dengan mengungkapkan rasa terima kasih kepada Tuhan Yang Mahakuasa, buku berjudul, Penguatan Demokrasi, akhirnya dapat diselesaikan. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu menyusun buku ini, yaitu:

1. Para ahli di bidang demokrasi.
2. Para ahli di bidang politik.
3. Para ahli di bidang hukum.
4. Para ahli di bidang pendidikan.
5. Para ahli di bidang sosial.

PENDAHULUAN

Demokrasi sangat bermanfaat bagi bangsa dan negara karena rakyat yang merdeka dan pemerintah yang bertanggung jawab, mandiri, kredibel, kompeten, profesional, dan transparan sangat dibutuhkan oleh bangsa dan negara. Orang-orang independen memiliki pendidikan yang berfokus pada mengubah warga negara menjadi ahli atau ilmuwan atau pekerja terampil dan pengusaha atau pengusaha atau pedagang yang rajin, kreatif, dan inovatif, dan warganya pandai memilih kandidat yang bertanggung jawab, mandiri, kredibel, kompeten, profesional, dan transparan untuk pemerintahan yang baik bagi bangsa dan negara tanpa ditipu dan dibodohi oleh populisme, politik gambar, konspirasi, propaganda, kampanye politik kotor, masalah politik kotor, radikalisme, ideologi transnasional, berita tipuan, disinformasi, kebenaran pos, permainan politik, dan permainan geopolitik.

Demokrasi berarti bahwa warganya independen dan cerdas dalam memilih kandidat profesional dan kompeten untuk kepemimpinan nasional, dan tidak dapat ditipu dan dibohongi oleh populisme, politik citra, permainan politik, permainan geopolitik, propaganda, konspirasi, kampanye politik kotor, masalah politik kotor, radikalisme, ideologi transnasional, disinformasi, tipuan, kebenaran pos, bid'ah, fitnah, kemunafikan, dan penipuan. Demokrasi juga berarti bahwa pemerintah dan warga negara independen dan cerdas dalam mengelola aset (sumber daya alam, sumber daya manusia, kewirausahaan, keahlian, pekerjaan, tata kelola pemerintah, tata kelola lingkungan, tata kelola populasi, strategi ekonomi, strategi pengembangan infrastruktur, strategi pemberantasan kejahatan, strategi penegakan hukum, dan strategi desain legislatif).

Masalah dengan demokrasi saat ini adalah bahwa komunitas internasional dan warga negara masih mudah tertipu dan dibodohi oleh mafia, radikal, ekstrimis, teroris, konspirator, koruptor, oligarki, diktator, otoriter, totaliter, fasis, imperialis, penjajah, dan globalis. Masalah-masalah demokrasi pada akhirnya menuntut komunitas internasional dan warga negara untuk bersatu, bekerja bersama dan cerdas dalam menghindari dan mengatasi berbagai tindakan kejahatan terorganisir, kejahatan tersembunyi, konspirasi, propaganda, ideologi transnasional, disinformasi, tipuan, kebenaran pos, retorika toleransi, permainan politik, dan permainan geopolitik.

PEMBAHASAN

1.1 Pemerasan Politik

Pemerasan politik berarti bahwa oligarki, diktator, otoriter, totaliter, fasis, imperialis, penjajah dan globalis melakukan tindakan pemerasan terhadap orang kaya, pegawai negeri, petugas polisi, agen intelijen, hakim, jaksa penuntut, pengacara dan tentara militer untuk tunduk dan menaati mereka tanpa kecuali. Biasanya pemerasan politik disertai dengan ancaman untuk membunuh orang yang paling dekat dengan orang kaya, pegawai negeri, petugas polisi, agen intelijen, hakim, jaksa penuntut, pengacara dan tentara militer. Untuk mengakali dan mengatasi pemerasan politik, maka warga negara, orang kaya, pegawai negara, petugas polisi, agen intelijen, hakim, jaksa, pengacara, dan tentara militer harus bersatu dan bekerja bersama dalam memburu dan memberantas oligarki, diktator, otoriter, totaliter, fasis, imperialis, penjajah, dan globalis karena mereka hanyalah makhluk ciptaan yang tak berdaya, orang biasa tanpa kekuatan super, dan bukan Tuhan sehingga mereka semua mudah diberantas dan ditangani dengan tegas. Dapat dikatakan bahwa warga negara harus menggunakan solidaritas, persatuan, dan tindakan kerja sama yang bertujuan menyelamatkan nyawa anggota keluarga dari cengkeraman oligarki, diktator, otoriter, totaliter, fasis, imperialis, penjajah, dan globalis sehingga orang kaya, pegawai negara, anggota polisi, agen intelijen, hakim, jaksa penuntut, pengacara dan tentara militer pada akhirnya membantu warga untuk membasmi dan menghancurkan oligarki, diktator, otoriter, totaliter, fasis, imperialis, penjajah, dan globalis.

Pemerasan politik juga dapat dilakukan oleh mafia, radikalis, ekstrimis, teroris, konspirator, koruptor, oligarki, diktator, otoriter, totaliter, fasis, imperialis, penjajah, dan globalis ketika mereka telah ditangkap oleh penegak hukum melalui biasanya sesama penjahat harus menjaga rahasia kejahatan terorganisir yang telah dilakukan oleh rekannya kemudian menggunakan rahasia rekannya melalui pemerasan sehingga dia tidak dihukum oleh penegak hukum atau dia tidak memiliki hukuman sama sekali.

Pemerasan politik juga dapat dilakukan oleh orang kaya yang memeras rezim pemerintah, elit politik, dan partai politik untuk mengembangkan bisnis mereka. Untuk mengakali dan mengatasi pemerasan politik di atas, maka pemerintah harus membiayai kampanye politik dan mengadakan kampanye politik yang murah dan terjangkau untuk semua warga negara melalui kampanye politik yang memperjuangkan ide-ide antara kandidat yang diadakan di universitas atau forum yang mengundang ahli, ilmuwan, jurnalis, dosen, siswa, guru, pekerja, dokter, petani, peternak, nelayan, dan warga negara, kemudian kampanye politik melawan ide disiarkan di YouTube, situs web, Aplikasi Android dan aplikasi iOS khusus untuk kampanye politik, media pers, media sosial, radio, dan televisi sehingga kampanye politik dapat dicapai oleh semua warga negara dalam kerangka warga negara dapat memilih kandidat yang bertanggung jawab, independen, kredibel, kompeten, profesional, dan transparan dalam memajukan dan makmur bangsa dan negara, menegakkan kebenaran dan keadilan, dan menjaga perdamaian dan harmoni.

Bagaimana rezim pemerintah atau penegak hukum dapat menggunakan penegakan hukum sebagai permainan politik? Jawabannya adalah melalui pemerasan politik di mana para pemimpin polisi atau pemimpin lembaga anti-korupsi memeras pejabat negara atau menteri yang terlibat dalam kasus-kasus kejahatan terorganisir atau korupsi dan kemudian kasus-kasus tersebut tidak diungkapkan kepada publik karena

penyelidikan harus rahasia atau ditutup atau bisa sebaliknya, seperti presiden menggunakan lembaga kepolisian, lembaga intelijen, dan anti-lembaga korupsi untuk menemukan kasus kejahatan yang telah dilakukan oleh pejabat negara atau menteri atau pemimpin polisi, kemudian memeras pejabat negara atau menteri atau pemimpin polisi secara tersembunyi dan terorganisir dan kemudian menggunakannya sebagai boneka politik untuk mempertahankan kekuasaan yang dimiliki oleh presiden.

Sehingga tidak ada tindakan pemerasan terhadap pelaku tindak pidana dan pelaku tindak pidana tidak memberikan tip dan suap selama investigasi, maka hasil investigasi yang dilakukan oleh penegak hukum harus menyertai hasil tes poligraf yang menunjukkan bukti yang sah bahwa mereka menangani kasus kejahatan dalam anti-pengkhianatan, boneka anti-politik, anti-sewenang-wenang, anti-suap, anti-gratifikasi, anti-korupsi, anti-pemerasan, jujur, tulus, tegas, adil, bertanggung jawab, independen, kredibel, kompeten, komprehensif, profesional, dan transparan.

1.2 Dunia Kriminal

Kelemahan dunia kriminal adalah bahwa para penjahat dan orang-orang munafik selalu sombong sehingga mereka mudah dikalahkan dan diberantas karena mereka mudah ceroboh; tidak memiliki mitra yang dapat dipercaya karena sifatnya yang berbahaya; dengan mudah melanggar janji sehingga rekan-rekannya tidak mudah mempercayai janji-janji keamanan yang dibuat oleh teman-temannya; dan kurangnya ide untuk mengatasi masalah kesombongan mereka adalah karena Tuhan mereka, yaitu Allah sengaja membatasi kelicikan mereka. Itu adalah kelemahan yang dapat dieksploitasi oleh warga dan komunitas internasional sehingga Anda semua dapat memberantas dan menghancurkan penjahat, mafia, gangster, radikal, ekstrimis, teroris, konspirator, koruptor, oligarki, diktator, otoriter, totaliter, fasis, imperialis, kolonialis, dan globalis. Kelemahan di dunia kriminal juga permanen sampai selamanya karena kelemahan di dunia kriminal adalah bagian dari apa yang telah ditakdirkan oleh Allah (Tuhan).

Kelemahan lain di dunia kriminal adalah bahwa jika Anda tidak kompeten dalam melakukan kejahatan terorganisir, kejahatan tersembunyi, dan konspirasi maka Anda dan anggota keluarga Anda akan dibunuh oleh kolega Anda yang berkolaborasi dengan Anda. Komunitas dan warga internasional dapat mengeksploitasi kelemahan di atas melalui solidaritas, persatuan, kerja sama timbal balik, dan keadilan terorganisir. Misalnya, hakim, jaksa penuntut, dan pengacara takut bahwa mereka akan dibunuh oleh mafia darat jika mafia darat tidak memenangkan konflik agraria, maka warga negara harus hadir untuk membela dan melindungi hakim, jaksa penuntut, dan pengacara, serta anggota keluarga mereka sehingga hakim, jaksa penuntut, dan pengacara dapat tetap aman dari ancaman dan intimidasi yang dilakukan oleh mafia darat, dan mereka masih bisa menghukum mafia darat tanpa rasa takut dan akhirnya konflik agraria akan dimenangkan oleh warga. Ketika Anda berada dalam konflik dan berperang melawan mafia darat, maka warga negara harus segera mendapatkan koneksi politik dan jaringan politik di pengadilan dan penegak hukum, ditambah melindungi pengadilan dan penegak hukum dari ancaman, intimidasi, dan penyuapan yang dilakukan oleh mafia darat sehingga warga negara dapat memenangkan konflik agraria. Itu prosedurnya.

1.3 Oligarki

Karena sesama oligarki di antara mereka memiliki rahasia kejahatan terorganisir yang telah dilakukan oleh rekan-rekan mereka, maka kelemahan mereka dapat digunakan oleh warga negara dan penegak hukum untuk menangkap semua oligarki karena satu anggota oligarkis hanya mereka yang ditangkap kemudian secara otomatis satu anggota oligarki akan segera memberi tahu siapa pun yang merupakan anggota lembaga negara termasuk dalam oligarki sehingga semua anggota oligarki dapat langsung ditangkap dan dihukum oleh penegak hukum tanpa belas kasihan.

Kelemahan dari sistem oligarki adalah bahwa jika elit politik yang jujur, cerdas, tegas, dan adil mulai menduduki semua kursi di parlemen dan salah satunya menjadi pemimpin negara, maka oligarki akan runtuh.

Karena kapitalis, oligarki, dan elit global menggunakan politik kekuasaan, politik zero sum, politik kotor, politik adu domba, permainan, retorika, narasi manipulatif, kejahatan terorganisir, perang informasi, perang dagang, dan perang teknologi sebagai sarana untuk merebut sumber daya alam, aset negara, serta lahan maka sebenarnya mereka telah melakukan kejahatan kemanusiaan, kejahatan terorganisir, kejahatan siber, kekejaman, kekerasan, dan kemunafikan. Undang-undang yang dilanggar oleh kapitalis, oligarki, dan elit global adalah undang-undang tentang anti monopoli, undang-undang tentang ketertiban umum, undang-undang tentang pencemaran nama baik, undang-undang tentang penyebaran disinformasi, undang-undang tentang penyuapan dan gratifikasi, undang-undang tentang agraria, undang-undang tentang pengelolaan sumber daya alam, undang-undang tentang penganiayaan, undang-undang tentang pembunuhan berencana, undang-undang tentang pembunuhan, undang-undang tentang korupsi, undang-undang tentang pencurian, undang-undang tentang pengusiran paksa, undang-undang tentang penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan, serta undang-undang tentang kejahatan terorganisir. Mereka harus mendapatkan hukuman mati tanpa terkecuali, izin perusahaan mereka juga harus dicabut tanpa ampun, dan perusahaan mereka harus dihancurkan karena perizinan usaha telah dicabut.

Kerugian menjadi kapitalis, oligarki, dan elit global adalah mereka mendapatkan hukuman mati karena mereka melanggar banyak undang-undang, perizinan bisnis dicabut, perampasan aset tanpa ampun, perusahaan mereka akan dihancurkan, serta masuk ke neraka dan mereka juga mendapatkan hukuman pedih dan siksaan keras sampai selamanya di neraka.

Oligarki jelas akan menggunakan kementerian agraria untuk menguasai lahan dan sumber daya alam sehingga mereka jelas termasuk mafia tanah dan mafia tambang. Mereka seharusnya mendapatkan hukuman dari rezim pemerintah dan pengadilan. Penggunaan kebijakan untuk merebut lahan dan sumber daya alam demi kepentingan golongan atau kepentingan pribadi jelas termasuk kejahatan terorganisir, korupsi, dan pengkhianatan terhadap bangsa dan negara.

Kementerian yang jelas dipakai oleh kapitalis, oligarki, dan elit global supaya mereka bisa menguasai lahan dan sumber daya alam adalah kementerian agraria, kementerian pertambangan, dan kementerian energi. Kapitalis, oligarki, dan elit global merupakan bagian dari mafia tanah, mafia tambang, mafia impor, mafia barang, dan mafia pangan. Mereka adalah mafia kelas atas karena mereka menggunakan rezim pemerintah, kementerian, parlemen, kebijakan, partai politik, elit politik, pengadilan, dan polisi untuk melindungi diri mereka sendiri, serta untuk menguasai lahan dan sumber daya alam.

Hukuman adil untuk kapitalis, oligarki, dan elit global adalah hukuman mati, perampasan aset, izin usaha mereka harus dicabut, dan perusahaan mereka harus dihancurkan.

Kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh kapitalis, oligarki, dan elit global adalah penganiayaan dan pembunuhan melalui kriminalisasi dan penegakan hukum sewenang-wenang; pengusiran paksa melalui pemalsuan sertifikat tanah dan penggusuran tempat tinggal warga negara; perbudakan dan eksploitatif melalui perusahaan mereka; kontrak kerja secara terus menerus tanpa henti dan penggunaan perusahaan outsourcing sehingga karyawan mereka tidak mendapatkan upah layak dan uang pesangon; menggagalkan bisnis kompetitor mereka melalui kegagalan eksposur atau kegagalan promosi barang/jasa sehingga tidak ada satupun konsumen yang tertarik untuk membeli produk atau jasa di perusahaan kompetitor mereka; mengatur algoritma yang ada di media sosial supaya mereka bisa menurunkan jumlah orang yang menonton promosi barang atau jasa yang dilakukan oleh perusahaan kompetitor mereka; penimbunan barang dan penimbunan pangan sehingga terjadi kenaikan harga barang dan kenaikan harga pangan, dan kenaikan inflasi sehingga bisnis kompetitor mereka yang hanya mampu menjangkau orang-orang yang berdaya beli rendah mengalami kebangkrutan dan memicu krisis ekonomi; perampasan sumber daya alam melalui kejahatan terorganisir, penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan, pengkhianatan terhadap bangsa dan negara, undang-undang tidak adil, dan kebijakan tidak adil; penggunaan narasi manipulatif dan kampanye politik hitam untuk menjatuhkan dan membunuh elit politik baik dan aktivis, dan membubarkan partai politik baik; serta penggunaan monopoli, permainan politik, permainan hukum, retorika penegakan hukum, retorika ekonomi, perang dagang, perang informasi, perang teknologi, fasisme, imperialisme, dan unilateralisme.

Patriotis dan nasionalis yang saat ini menjabat sebagai pejabat negara atau anggota parlemen atau pemimpin negara kemudian dia membela dan mendukung keberadaan kapitalis, oligarki, dan elit global maka dia sudah bukan lagi patriotis dan nasionalis karena bagaimanapun juga metode ekonomi yang dipakai kapitalis, oligarki, dan elit global untuk menguasai aset adalah neo kolonialisme atau kolonialisme modern. Masih layak kah negarawan yang dahulu kala membela dan mendukung kemerdekaan dan menentang kolonialisme atau kontra kolonialisme kemudian mereka saat ini malah membela dan mendukung neo kolonialisme atau kolonialisme modern yang dilakukan oleh kapitalis, oligarki, dan elit global disebut sebagai negarawan atau patriotis dan nasionalis? Jawabannya adalah tidak.

Karena pemerintah, parlemen, penegak hukum, dan pengadilan melindungi kapitalis, oligarki, dan elit global atau neo kolonialisme dan neo imperialisme maka mulailah muncul penegak hukum yang mudah untuk disuap lalu selanjutnya muncul mafia, gangster, kelompok bersenjata, kelompok teroris, penjahat terorganisir, konspirator, koruptor, diktator, otoriter, totaliter, fasis, unilateralis, dan globalis disebabkan oleh penegak hukum dan pengadilan yang mudah untuk disuap dan terakhir datanglah kekacauan global, kesengsaraan global, dan ketidakadilan internasional.

1.4 Diskusi Tertutup atau Musyawarah Rahasia

Diskusi tertutup atau musyawarah rahasia tidak boleh digunakan untuk melakukan kejahatan terorganisir, kejahatan tersembunyi, dan konspirasi. Diskusi tertutup atau musyawarah rahasia hanya dapat digunakan untuk memberantas kejahatan, konspirasi, kediktatoran, otoritarianisme, totaliterisme, fasisme, imperialisme,

kolonialisme, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme, serta menegakkan kebenaran dan keadilan.

Bukti hukum, bukti nyata, dan bukti ilmiah yang mendukung kenyataan bahwa sebenarnya diskusi tertutup atau pertimbangan rahasia tidak dapat digunakan untuk melakukan tindakan kejahatan terorganisir, kejahatan tersembunyi, dan konspirasi, dan diskusi tertutup atau musyawarah rahasia hanya dapat digunakan untuk memberantas kejahatan, konspirasi, fasisme, imperialisme, kolonialisme, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme adalah sebagai berikut!

"Apakah Anda tidak memperhatikan bahwa orang-orang yang telah dilarang mengadakan diskusi rahasia, kemudian mereka mengembalikan (melaksanakan) larangan dan mereka mengadakan diskusi rahasia untuk melakukan dosa, permusuhan dan ketidaktaatan kepada Rasul. Dan ketika mereka datang kepada Anda (Muhammad), mereka mengucapkan salam dengan cara yang tidak ditentukan Allah untuk Anda. Dan mereka berkata pada diri mereka sendiri, " Mengapa Allah tidak menghukum kita karena apa yang kita katakan? " Itu cukup bagi mereka di neraka yang akan mereka masuki. Maka neraka adalah tempat terburuk untuk kembali. " (Surat Al-Qur'an. Al-Mujadilah 58: Ayat 8)

"O, kamu yang percaya! Ketika Anda mengadakan diskusi rahasia, jangan berbicara tentang dosa, permusuhan, dan ketidaktaatan kepada Rasul. Tetapi bicaralah tentang perbuatan kebaikan dan kesalehan. Dan takutlah kepada Allah, kepada siapa kamu akan dikumpulkan. " (Surat Al-Qur'an. Al-Mujadilah 58: Ayat 9)

1.5 Basis Jaringan Politik

Jaringan politik, koneksi politik, dan kerja sama politik dibangun melalui solidaritas, kerja sama timbal balik dalam kebaikan, ekonomi, persahabatan, dan pernikahan. Mengapa jaringan politik, koneksi politik dan kerja sama politik yang dimiliki oleh warga dan komunitas internasional jauh lebih kuat dan jauh lebih unggul daripada mafia, gangster, radikal, ekstrimis, teroris, konspirator, koruptor, oligarki, diktator, otoriter, totaliter, fasis, imperialis, kolonialis, dan globalis? Jawabannya adalah bahwa warga negara mencakup semua tingkat masyarakat yang terdiri dari warga negara, pekerja, petani, peternak, nelayan, karyawan, guru, dosen, mahasiswa, dokter, pakar, ilmuwan, jurnalis, pengusaha atau pengusaha, pedagang, pemimpin negara, pejabat negara, menteri, anggota parlemen, pegawai negara, anggota partai politik, petugas polisi, agen intelijen, tentara militer, hakim, jaksa penuntut, dan pengacara, sementara komunitas internasional mencakup seluruh dunia atau semua negara. Jaringan politik, koneksi politik dan kerja sama politik yang dimiliki para penjahat dan orang-orang munafik sebenarnya sangat rapuh karena sesama penjahat mereka berbahaya dan selalu melanggar janji mereka sehingga para penjahat tidak memiliki mitra setia sedikit pun. Sementara itu, warga negara dan komunitas internasional memiliki jaringan politik, koneksi politik dan kerja sama politik yang sangat kuat dan sangat unggul karena solusi politik win-win di mana sesama warga negara akan mendapatkan kemakmuran bersama dan keadilan sosial untuk semua warga negara. Biasanya para penjahat dan orang munafik membangun jaringan politik, koneksi politik, dan kerja sama politik melalui persahabatan, ekonomi, dan pernikahan. Sementara itu, warga negara dan komunitas internasional membangun jaringan politik, koneksi politik, dan kerja sama politik melalui solidaritas, bekerja bersama untuk kebaikan, politik solusi win-win, kemakmuran bersama / kemakmuran global, dan keadilan sosial untuk semua warga negara / keadilan internasional.

1.6 Politik Win-Win Solution

Contoh nyata dari politik solusi win-win adalah bahwa warga memenangkan konflik agraria melawan mafia darat dan mafia darat menerima hukuman di pengadilan, sementara anggota keluarga dari pengadilan dan penegak hukum aman dari ancaman dan intimidasi yang dilakukan oleh mafia darat karena mereka dilindungi oleh warga yang bekerja sama dengan polisi. Contoh konkret lain dari politik solusi win-win adalah bahwa pemerintah memberikan bantuan kemanusiaan melalui dana bantuan kemanusiaan dan pelatihan untuk menjadi ahli / ilmuwan / pekerja terampil dan pengusaha / pengusaha / pengusaha yang rajin, kreatif, dan inovatif/pedagang, sementara warga negara membayar pajak dan melakukan transaksi jual beli untuk mempertahankan dan meningkatkan ekonomi negara dan negara.

Solusi menang-menang politik berarti bahwa kedua belah pihak mendapatkan saling menguntungkan, kemakmuran bersama, dan keadilan sosial bagi kedua belah pihak. Contoh konkret tambahan dari politik solusi win-win adalah bahwa penegak hukum dilatih setiap hari sehingga mereka memiliki karakter anti-sewenang-wenang, anti-suap, dan anti-gratifikasi serta jujur, tulus, akuntabel, independen, kredibel, kompeten, profesional, dan transparan dalam menegakkan kebenaran dan keadilan, sementara stabilitas negara pada akhirnya dipertahankan dan negara itu tidak mengalami kebangkrutan karena tidak ada mafia, gangster, radikal, ekstrimis, teroris, konspirator, koruptor, oligarki, diktator, otoriter, totaliter, fasis, imperialis, penjajah, dan globalis.

Contoh konkret tambahan lain dari politik solusi win-win adalah negara-negara yang bertukar informasi berguna terkait dengan tata kelola pemerintah, tata kelola lingkungan, tata kelola aset (sumber daya alam dan tata kelola sumber daya manusia), dan strategi penegakan hukum tanpa pandang bulu dan anti-impunitas.

1.7 Politik Zero Sum

Politik zero sum hanya boleh digunakan untuk mengalahkan kejahatan, ketidakadilan, konspirasi, radikalisme, disinformasi, tipuan, salah arah / bid'ah, kemunafikan, dan penipuan, dan menegakkan kebenaran dan keadilan. Nol jumlah politik tidak boleh digunakan untuk melaksanakan retorika toleransi, konspirasi, kediktatoran, otoriterisme, totaliterisme, fasisme, imperialisme, kolonialisme, radikalisme, ekstremisme, terorisme, politik memerangi domba, kampanye politik kotor, kejahatan terorganisir, permainan politik, dan permainan geopolitik, serta menjunjung tinggi kejahatan, ketidakadilan, kesesatan/bid'ah, kemunafikan, kebohongan, dan penipuan.

Contoh konkret dari politik zero sum adalah warga negara, penegak hukum, dan rezim pemerintah yang bekerja bersama untuk mengakali dan mengatasi masalah mafia tanah. Contoh lain adalah polisi melatih anggota mereka sehingga mereka memiliki nilai-nilai anti-suap dan anti-gratifikasi, kebiasaan, personalitas, dan karakter untuk mengalahkan tindakan penyuapan dan kepuasan yang dilakukan oleh penjahat dan orang munafik. Tambahan contoh nyata dari politik zero sum adalah polisi menggunakan metode permainan peran dan metode simulasi sehingga mereka dapat meningkatkan kompetensi dan profesionalisme mereka dalam menegakkan kebenaran dan keadilan.

1.8 Keadilan Terorganisir

Keadilan terorganisir adalah tindakan keadilan yang terstruktur dan sistematis di mana tindakan keadilan menggunakan solidaritas, kerja sama timbal balik dalam kebaikan dan keadilan, diskusi tertutup atau pertimbangan rahasia, kelicikan, kreativitas, inovasi, improvisasi, ceramah para pejuang dalam buku Al-Qur'an, strategi penegakan hukum yang berguna, pengetahuan yang berguna, informasi yang berguna, dan ide-ide yang berguna, serta penegak hukum yang anti-gratifikasi, anti-penyuapan, anti-sewenang-wenang, jujur, adil, akuntabel, independen, kredibel, kompeten, profesional, dan transparan, dan pengadilan yang anti-gratifikasi, anti-suap, anti-sewenang-wenang, jujur, adil, bertanggung jawab, independen, kredibel, kompeten, profesional, dan transparan untuk mengalahkan dan menghancurkan kejahatan, kejahatan terorganisir, kekejaman, kekerasan, ketidakadilan, konspirasi, permainan politik, permainan geopolitik, retorika politik, retorika geopolitik, kediktatoran, otoritarianisme, totalitarianisme, fasisme, imperialisme, kolonialisme, radikalisme, ekstremisme, terorisme, penyebaran disinformasi dan tipuan, kemunafikan, dan penipuan.

Untuk menerapkan keadilan terorganisir, maka pemerintah dan warga negara benar-benar membutuhkan strategi perang yang efektif dan efisien melawan kejahatan, kejahatan terorganisir, konspirasi, ketidakadilan, kemunafikan, dan penipuan.

Strategi penegakan hukum yang berguna perlu menggunakan strategi perang yang efektif dan efisien untuk memerangi kejahatan terorganisir dan konspirasi sambil mencegah tindakan kejahatan dan ketidakadilan, solidaritas, kerja sama timbal balik dalam kebaikan, pengetahuan yang berguna, informasi yang berguna, ide-ide yang berguna, kelicikan, kreativitas, inovasi, improvisasi, dan membutuhkan orang-orang yang anti-kesewenang-wenangan, anti-korupsi, anti-hedonisme, anti-suap, anti-gratifikasi, jujur, tulus, tidak pernah menyerah, bertanggung jawab, mandiri, kredibel, kompeten, berbakat, terampil, profesional, dan transparan di bidang penegakan hukum.

Sehingga Allah (Tuhan) membantu pemerintah dan warga negara dalam menegakkan kebenaran dan keadilan, serta menghancurkan kejahatan, ketidakadilan, kesesatan/bid'ah, kemunafikan, kebohongan, dan penipuan, maka pemerintah dan warga negara harus selalu berdoa kepada Allah (Tuhan) dan kemudian menganalisis kebenaran, fakta ilmiah, pengetahuan agama yang lurus, pengetahuan yang berguna, informasi yang berguna, dan ide-ide berguna yang relevan dan mampu mengakhiri kejahatan atau masalah ketidakadilan atau kemunafikan/kesalahpahaman/kebohongan/bid'ah/disinformasi/berita hoaks/post truth/radikalisme/ideologi transnasional.

Jika penegakan hukum memiliki kelemahan maka kejahatan terorganisir juga memiliki kelemahan. Kelemahan kejahatan terorganisir bisa dianalisis melalui pemikiran kritis, politik rasional, intelijen, penyelidikan, psikoanalisis, dan psikologi kriminal. Setelah mendapat titik lemah dari berbagai tindakan kejahatan terorganisir maka selanjutnya adalah membuat pengambilan keputusan dengan berpikir kritis dan menggunakan kelicikan, kreativitas, inovasi, ide-ide bermanfaat, informasi bermanfaat, dan solusi bermanfaat untuk mengakali, mengatasi, dan mengakhiri kejahatan terorganisir, serta mencegah terjadinya tindak kejahatan terorganisir.

Salah satu dari kelemahan kejahatan terorganisir adalah kejahatan terorganisir sudah tidak bisa lagi ditutupi oleh penjahat manapun disebabkan oleh adanya tes poligraf, viralisasi, pemikiran kritis, politik rasional, intelijen, penyelidikan, forensik, visum, psikologi kejujuran, psikoanalisis, dan psikologi kriminal.

Malas-malasan dalam menegakkan kebenaran, keadilan, kedamaian, kemanusiaan, ketertiban, dan kerukunan yang dilakukan oleh penegak hukum termasuk kejahatan kemanusiaan, kejahatan terorganisir, dan pengkhianatan terhadap bangsa dan negara. Warga negara bisa menggugat petugas polisi yang malas-malasan dalam penegakan hukum melalui undang-undang tentang kejahatan kemanusiaan, undang-undang tentang kejahatan terorganisir, dan undang-undang tentang pengkhianatan terhadap bangsa dan negara.

1.9 Mafia Tanah

Untuk mengalahkan mafia tanah di pengadilan, maka warga negara harus mengundang tetangga untuk melayani sebagai saksi dan saksi mereka harus dijaga ketat sehingga mereka tidak diancam atau disuap oleh mafia darat, serta membawa bukti, yaitu sertifikat tanah palsu ditambah sertifikat tanah palsu harus difoto dan foto harus disimpan di tempat yang aman, seperti laptop, komputer, ponsel / smartphone, Google Drive, Microsoft One Drive, dan sejenisnya, disertai dengan foto, harus diberi kata sandi sehingga tidak mudah dihapus oleh mafia darat, kemudian gunakan hukum tentang pemalsuan dan hukum tentang kejahatan terorganisir untuk menghukum mafia tanah. Itu prosedurnya.

Untuk mengakali dan mengatasi pemalsuan sertifikat tanah, pemerintah membuat sertifikat tanah digital sehingga data terintegrasi dan saling berhubungan dengan pemerintah pusat, pemerintah kota atau kabupaten, pemerintah provinsi, dan warga negara.

Untuk mengakali dan mengatasi tuduhan palsu dari mafia tanah bahwa sertifikat tanah Anda dibuat oleh broker atau tidak di lembaga negara yang menangani pembuatan sertifikat tanah, maka Anda melakukan tes poligraf atau tes kejujuran bersama dengan mafia darat, mengundang tetangga sebagai saksi, dan pemerintah memberikan sampel sertifikat tanah yang legal dan sertifikat tanah yang ilegal sehingga tindakan memalsukan sertifikat tanah yang dilakukan oleh mafia tanah akhirnya terungkap dan pada akhirnya mafia darat dapat dihukum melalui undang-undang tentang pemalsuan dokumen dan undang-undang tentang kejahatan terorganisir. Gunakan hukum tambahan, seperti hukum tentang penyuapan, hukum tentang menghancurkan bukti, hukum tentang ancaman kematian, dan undang-undang tentang pembunuhan berencana jika mafia darat melakukan tindakan menghancurkan bukti, penyuapan, kepuasan, atau ancaman kematian, dan pembunuhan berencana.

Jangan lupa bahwa jika Anda ingin membuat sertifikat tanah di lembaga negara yang menangani pembuatan sertifikat tanah yang sah, maka gunakan ponsel/handphone/smartphone untuk memotret dan mencatat setiap proses pembuatan sertifikat tanah yang Anda lakukan sehingga Anda dapat mengalahkan mafia darat di pengadilan jika mafia darat telah memalsukan sertifikat tanah yang dimiliki oleh Anda dan ingin merebut tanah yang Anda miliki.

Foto dan rekaman video ketika Anda membuat sertifikat tanah di lembaga negara yang secara resmi menangani pembuatan sertifikat tanah yang sah dapat digunakan sebagai bukti bahwa mafia tanah telah memalsukan sertifikat tanah kamu sendiri. Simpan bukti di tempat yang aman, seperti ponsel/smartphone/handphone, laptop, komputer, Google Drive, dan Microsoft One Drive, ditambah file harus dikata sandi sehingga tidak dapat dihapus oleh mafia darat.

Jumlah minimum bukti yang diperlukan untuk mengalahkan mafia tanah di pengadilan adalah dua bukti yang sah. Semakin banyak bukti hukum, semakin besar peluang bagi warga negara untuk mengalahkan mafia tanah di pengadilan.

Untuk mengalahkan mafia tanah di pengadilan, warga negara harus memiliki dua bukti hukum, yaitu sertifikat tanah yang telah dipalsukan oleh mafia tanah dan bukti foto atau video bahwa warga negara telah membuat sertifikat tanah di lembaga negara yang secara resmi menangani pembuatan sertifikat tanah; tetangga dan kepala desa sebagai saksi yang jujur dan tulus dalam memberikan kesaksian di pengadilan; penggunaan tes poligraf atau tes kejujuran untuk menentukan kebohongan yang dilakukan oleh mafia darat; warga negara harus membantu tetangga mereka yang tanahnya disengketakan oleh mafia darat; polisi bersama warga harus melindungi penyelidik, hakim, jaksa penuntut, dan pengacara dari ancaman, intimidasi dan penyuapan yang dilakukan oleh mafia darat; serta penyelidik, hakim, jaksa penuntut, dan pengacara yang anti-sewenang-wenang, anti-suap, anti-gratifikasi, jujur, tulus, adil, bertanggung jawab, independen, kredibel, kompeten, profesional dan transparan dalam menegakkan kebenaran dan keadilan.

Bekingan dari institusi negara untuk mafia tanah adalah kementerian agraria, institusi negara yang menangani pembuatan sertifikat tanah, dan gubernur/senator atau walikota/bupati. Kementerian agraria, institusi negara yang menangani pembuatan sertifikat tanah, dan gubernur/senator atau bupati/walikota biasanya melakukan kejahatan terorganisir dalam rangka penguasaan tanah secara ilegal melalui kapitalis, oligarki, dan elit global biasanya menyuap kementerian agraria, gubernur/senator atau walikota/bupati, dan institusi negara yang menangani pembuatan sertifikat tanah kemudian pejabat negara yang mengurus pembuatan sertifikat tanah akan membuat sertifikat tanah legal dari setiap tanah kosong yang ada di provinsi atau kabupaten/kota, serta memalsukan sertifikat tanah milik warga negara pada saat warga negara telah membeli tanah kosong untuk keperluan tempat tinggal atau bisnis.

Bekingan dari institusi negara untuk mafia tanah termasuk pengadilan melalui kapitalis, oligarki, dan elit global menyuap hakim di pengadilan supaya mereka memenangkan gugatan terkait dengan sengketa tanah.

Menteri agraria atau gubernur atau senator atau walikota atau bupati juga bisa menjadi mafia tanah melalui mereka biasanya menyuap institusi negara yang menangani pembuatan sertifikat tanah kemudian pejabat negara yang mengurus pembuatan sertifikat tanah akan membuat sertifikat tanah legal dari setiap tanah kosong yang ada di provinsi atau kabupaten atau kota, dan memalsukan sertifikat tanah milik warga negara pada saat mereka sedang membuat sertifikat tanah lalu menteri agraria atau gubernur atau senator atau walikota menjual sertifikat tanah yang mereka dapatkan secara ilegal ke kapitalis, oligarki, dan elit global.

Untuk mengetahui apakah ada menteri agraria/mantan menteri agraria atau gubernur/mantan gubernur atau senator/mantan senator atau walikota/mantan walikota atau bupati/mantan bupati yang menjadi mafia tanah dan menjual sertifikat tanah yang didapat secara ilegal melalui penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan, korupsi tanah, serta penyuapan dan gratifikasi atau pelakunya sebenarnya tidak ada sama sekali maka pemerintah dan penegak hukum harus melakukan penyelidikan yang jujur, tegas, ikhlas, adil, akuntabel, independen, kompeten, komprehensif, kredibel, profesional, dan transparan terhadap orang-orang diatas, serta gunakanlah tes poligraf.

1.10 Mafia Pangan

Strategi perang yang efektif dan efisien untuk memberantas, mengalahkan, dan menghancurkan mafia pangan adalah sebagai berikut!

1. Polisi berkolaborasi dengan para ahli di bidang pertanian, peternakan, perikanan, makanan, dan minuman untuk ditransfer dari kemasan reguler ke kemasan premium untuk mendapatkan keuntungan.

2. Polisi memeriksa jumlah stok makanan secara langsung dengan pebisnis, pedagang, distributor, dan produsen sehingga tidak ada lagi praktik penimbunan.

3. Polisi menggunakan tes poligraf untuk mengukur kinerja lembaga yang menangani stok makanan, dan untuk mengetahui bahwa tidak ada pebisnis, pedagang, distributor dan produsen yang melakukan penipuan, seperti penyelundupan makanan ke luar negeri.

Polisi mendidik pebisnis, pedagang, distributor, dan produsen yang menaikkan harga pangan di luar daya beli warga dapat mengakibatkan peningkatan inflasi yang pada akhirnya akan memicu kebangkrutan bisnis mereka dan negara mereka.

Polisi mendidik pebisnis, pedagang, distributor, dan produsen yang melakukan penipuan akan kehilangan kepercayaan konsumen sehingga bisnis mereka akan bangkrut.

Mafia pangan dan mafia impor biasanya menimbun pangan dan barang impor di pelabuhan, produsen, distributor, dan pedagang.

Penimbunan barang adalah praktek kecurangan ekonomi melalui memalsukan jumlah stok barang supaya pedagang/pebisnis atau distributor atau produsen mendapatkan keuntungan lebih banyak daripada berdagang atau berbisnis secara jujur. Contohnya adalah jumlah stok masker adalah 5000, tapi di toko online hanya ada 1000 stok masker.

Kenaikan harga pangan bisa terjadi karena penimbunan pangan di pelabuhan, produsen, distributor, dan pedagang; pemindahan pangan ke kemasan lain; penyelundupan pangan ke luar negeri atau ekspor pangan tanpa ketahuan oleh pemerintah dan institusi yang menangani ekspor dan impor. Itulah upaya jahat yang bisa dilakukan oleh mafia pangan, kapitalis pangan, oligarki pangan, dan elit global pangan.

Menjadikan pangan sebagai bantuan sosial supaya harga pangan tetap mahal sehingga pasokan pangan di pasaran menjadi berkurang secara signifikan dan masif juga bisa dilakukan oleh mafia pangan. Tapi masalahnya adalah oknum yang bisa melakukan hal diatas adalah mafia pangan kelas atas yang saat ini menduduki jabatan di kementerian sosial dan rezim pemerintah. Bantuan sosial seharusnya dalam bentuk uang. Bantuan sosial juga harus dalam bentuk makanan dan minuman yang bisa langsung di konsumsi oleh warga negara pada saat ada wilayah negara yang mengalami kelaparan dan kehausan. Bantuan pangan dalam bentuk beras, gandum, minyak goreng, gula, garam, daging, telur, susu, dan ikan harus didistribusikan langsung ke pasaran supaya harga pangan tetap terjaga sambil tetap diawasi oleh rezim pemerintah, penegak hukum, dan warga negara. Jika harga pangan melonjak naik maka langsung laporkan ke pemerintah dan penegak hukum melalui tag akun resmi milik pemerintah dan penegak hukum di media sosial disertai tunjukkan lokasi pasar yang mengalami kenaikan harga pangan. Lokasi pasar harus lengkap, mendetail, dan komprehensif supaya pemerintah dan penegak hukum bisa

langsung melakukan penyelidikan yang jujur, tegas, ikhlas, akuntabel, independen, kompeten, komprehensif, kredibel, profesional, dan transparan.

Bekingan dari institusi negara untuk mafia pangan adalah kementerian pertanian, institusi pangan nasional, dan institusi polisi. Kementerian pertanian dan institusi pangan nasional melindungi mafia pangan melalui pemalsuan dokumen yang terkait dengan jumlah pasokan pangan di dalam negeri dan menyebarluaskan disinformasi, yaitu pasokan pangan mengalami krisis karena masalah bencana alam tanpa adanya penyelidikan yang jujur, tegas, ikhlas, adil, akuntabel, independen, kompeten, komprehensif, kredibel, profesional, dan transparan. Institusi polisi melindungi mafia pangan melalui pemerasan atau mafia pangan menyuap petugas polisi yang menangani masalah pasokan pangan kemudian memalsukan dokumen terkait dengan hasil penyelidikan terhadap pasokan pangan. Mafia pangan biasanya menyuap kementerian pertanian, institusi pangan nasional, dan institusi polisi untuk menutupi kejahatan teorganisir mereka.

1.11 Mafia Olahraga

Untuk mengatasi masalah mafia bola adalah pemerintah membuat aplikasi untuk membeli tiket dan menggunakan kartu tanda penduduk sebagai alat untuk pembelian tiket agar tidak ada mafia tiket.

Untuk menyelesaikan masalah tukar tambah skor pertandingan olahraga maka organisasi olahraga dan kementerian olahraga menggunakan metode bermain peran dan metode simulasi untuk melatih wasit kemudian menggunakan tes poligraf dan sanksi kepada wasit yang tidak jujur.

1.12 Mafia Pupuk

Kelangkaan pupuk terjadi karena adanya krisis iklim ekstrim atau konflik atau perang di wilayah penghasil pupuk, ada konflik di jalur perdagangan internasional, jumlah permintaan pupuk jauh melampaui jumlah stok pupuk, penimbunan pupuk, pemindahan pupuk subsidi ke kemasan pupuk bermutu, dan ekspor pupuk ilegal. Pemerintah, kementerian pertanian, kementerian perdagangan, dan penegak hukum harus melakukan penyelidikan yang jujur, ikhlas, akuntabel, independen, kompeten, komprehensif, profesional, dan transparan berdasarkan hal-hal diatas dalam rangka menyelesaikan masalah pupuk.

1.13 Mafia Tambang

Untuk mengakali dan mengatasi mafia tambang adalah melalui warga negara melakukan viralisasi di media sosial dan tag akun media, seperti pemimpin negara, institusi polisi, dan pengadilan kemudian Mahkamah Agung memutuskan untuk mencabut izin perusahaan tambang ilegal dan memerintahkan polisi untuk menangkap dan memenjarakan orang yang menjalankan perusahaan tambang ilegal, serta satuan tugas yang dikirim oleh Mahkamah Agung sudah harus di tes poligraf demi mengetahui kejujuran dari ketegasan satuan tugas polisi yang menangani masalah pertambangan ilegal lalu polisi langsung mencabut izin perusahaan tambang ilegal, menyita hasil tambang ilegal, memenjarakan pebisnis yang menjalankan perusahaan tambang ilegal, hasil penyelidikan disiarkan ke publik ditambah dengan hasil tes poligraf yang membuktikan bahwa kejujuran dari penegakan hukum terhadap pertambangan ilegal, serta bekas tambang ilegal dijaga